

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PASAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**MARDIANSAH
2005/67875**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PASAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : MARDIANSAH
TM/NIM : 2005/67875
Program studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP : 19610502 198601 2 001

Pembimbing II



Yeniwati, SE, ME
NIP : 19760222 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

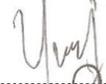
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PASAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nama : MARDIANSAH
TM/NIM : 2005/67875
Program studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dr.Sri Ulfa Sentosa, M.S	 1.....
2. Sekretaris : Yewiwati, SE, ME	 2.....
3. Anggota : Muhammad Irfan, SE, M.S	 3.....
4. Anggota : Drs. Ali Anis, M.S	 4.....

ABSTRAK

Mardiansah (2005/67875) : Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Ibu Dr. Sri ulfa Sentosa, M.S dan IbuYeniwati, SE.ME

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. (2) Pengaruh luas lahan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. (3) Pengaruh jumlah tanggungan kepala keluarga terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. (4) Pengaruh budaya kerja terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. (5) Pengaruh tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan, dan budaya kerja secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jenis data penelitian adalah data primer yang di olah dengan menggunakan analisis statistika. Populasi penelitian adalah seluruh rumah tangga miskin di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang berjumlah 2.261 kepala rumah tangga. Teknik pengambilan sampel adalah dengan random sampling yaitu sebanyak 96 kepala rumah tangga. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif melalui model regresi linear berganda yang terdiri atas Uji analisis R^2 , uji T dan uji F.

Hasil penelitian ini : (1) Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. Artinya semakin rendah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, semakin besar kemungkinan untuk berada dalam kemiskinan, (2) luas lahan kepala rumah tangga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. Luas lahan yang dimiliki kepala rumah tangga menentukan miskin atau tidak miskinnya suatu rumah tangga, (3) Jumlah tanggungan kepala rumah tanggamempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga, semakin banyak jumlah tanggungan kepala rumah tangga maka semakin besar suatu rumah tangga berada dalam kemiskinan, (4) Budaya kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. Artinya semakin rendahnya budaya kerja kepala rumah tangga maka semakin besar kemungkinan berada dalam kemiskinan dan (5) Tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan dan budaya kerja secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman. Artinya semakin tinggi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka semakin kecil peluang rumah tangga berada dalam kemiskinan.

Penulis menyarankan kepada kepala rumah tangga di Kecamatan Pasaman dituntut untuk menambah pengetahuan, keterampilan, semangat dalam bekerja dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta terwujudnya kesejahteraan dalam rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri ulfa Sentosa, M.S selaku pembimbing I dan Ibu Yeniwati, SE.ME selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberi izin pada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H.Alianis M.S dan IbuNovya Zulfa Riani, Se, M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar pada Fakultas Ekonomi yang telah memberikan sumbangan pikirannya selama perkuliahan demi terwujudnya skripsi ini.
5. Bapak Camat di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang telah membantu memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data-data

penelitian serta memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

6. Teristimewa kepada Ibu dan Ayah tercinta serta abang, kakak, serta adik-adik ku yang tersayang, yang telah tulus dan ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat–sahabat dan teman–teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah penulis memohon semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal, Amin....

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	17
C. Pembatasan Masalah	17
D. Perumusan Masalah	18
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	19
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	21
1. Konsep dan Teori Kemiskinan.....	21
2. Jenis Kemiskinan	24
a. Kemiskinan Absolut.....	23

b.	Kemiskinan Struktural	26
c.	Kemiskinan Kultural	28
3.	Ukuran Kemiskinan	29
4.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Kemiskinan.....	34
a.	Tingkat Pendidikan.....	35
b.	Luas Lahan.....	39
c.	Jumlah Tanggungan.....	41
d.	Budaya Kerja.....	44
B.	Temuan Penelitian Sejenis	46
C.	Kerangka Konseptual	48
D.	Hipotesis	50

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	52
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
C.	Populasi dan Sampel.....	52
D.	Variabel Penelitian	54
E.	Jenis Data Penelitian.....	54
F.	Teknik Pengumpulan Data	55
G.	Instrument Penelitian.....	55
H.	Uji Coba Kuisisioner.....	56
I.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	59
J.	Definisi Operasional.....	59
K.	Teknik Analisis Data dan Metode Pengujian	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	69
1. Gambaran Umum	69
2. Karakteristik Responden	71
3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	72
4. Analisis Induktif.....	79
a. Uji Asumsi Klasik	79
1. Uji Multikolinearitas	79
2. Uji Normalitas Sebaran Data	80
3. Uji Heterokedastisitas	80
b. Analisis Regresi Linear Berganda.....	82
c. Analisis R^2	84
5. Pengujian Hipotesis.....	85
a. Uji T	85
b. Uji F	87
B. Pembahasan	88

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2003-2009	5
2. Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009	8
3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandi Kec. Pasaman pada Tahun 2009	10
4. Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Pada tahun 2010	13
5. Kriteria Kemiskinan.....	31
6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Budaya Kerja	63
7. Luas Daerah Menurut Kenagarian Tahun 2010.....	69
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010	70
9. Distribusi Frekuensi Umur Responden.....	72
10. Distribusi Frekuensi Tingkat Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012.....	73
11. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012	75
12. Distribusi Frekuensi Luas lahan Kepala Rumah Tangga Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012	75
13. Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Keluarga di Kecamatan	

Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012.....	77
14. Distribusi Sikap Terhadap Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di KecamatanPasaman Tahun 2012.....	78
15. Distribusi Prilaku pada waktu bekerja Kepala Rumah Tangga KecamatanPasaman Tahun 2012.....	78
16. Uji Multikolinearitas.....	79
17. Uji Heterokedastisitas.....	81
18. Regresi Linear Berganda.....	82
19. Analisis R^2	84
20. Uji t.....	85
21. Uji F.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Angket Uji Coba	102
2. Tabulasi Uji Coba	105
3. Uji Validitas dan Reabilitas	106
4. Angket Penelitian	111
5. Tabulasi Data Penelitian	114
6. Tabel Distribusi Frekuensi Variable	117
7. Uji Heteroskedastisitas	123
8. Uji Normalitas	122
9. Regression Linear Berganda	125
10. Tabel T	127
11. Tabel F	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta mempunyai hakekat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia secara merata. Ini berarti pemerintah berupaya agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan dapat hidup secara layak. Semua ini bukan untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Salah satu permasalahan pokok pembangunan pada saat sekarang ini adalah masalah kemiskinan dan penanggulangan serta pengentasannya. Upaya pengentasan kemiskinan bukan pekerjaan ringan, hal ini disebabkan karena

kemiskinan itu sendiri sangat kompleks sifatnya dan multidimensi. Sehubungan dengan hal ini maka untuk memecahkan persoalannya diperlukan kebijaksanaan, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat dan juga perlu adanya informasi tentang lokasi daerah miskin agar program dari penyaluran dana pembangunan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam tujuan pembangunan nasional tersirat bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan yang tinggi saja, namun juga memberikan penekanan kepada aspek peningkatan pendapatan masyarakat dan aspek pemerataan. Dengan terwujudnya aspek tersebut diharapkan jumlah penduduk miskin dapat dikurangi.

Di Indonesia pembangunan yang dilakukan sejak tahun 1966 hingga menjelang krisis yang menerpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang lalu telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan dengan tujuan pembangunan, dimana Indonesia dapat dikatakan tergolong ke dalam negara yang berhasil dalam pembangunan. Selama lebih dari tiga dekade Indonesia telah mencatat prestasi yang mengesankan dalam pembangunan manusia. Keberhasilan ini di capai di berbagai bidang, mulai dari pengurangan, kemiskinan, kesenjangan pendapatan hingga peningkatan harapan hidup dan kemampuan membaca dan menulis. Angka kematian bayi misalnya, menurun tajam sejalan dengan peningkatan akses terhadap kesehatan dan sanitasi. Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan peranan perempuan, perbedaan rasio pria dan wanita di berbagai tingkat pendidikan semakin mengecil dan kontribusi wanita dalam pendapatan keluarga juga semakin membesar.

Akan tetapi keberhasilan pembangunan itu hanya berlangsung pada tiga dekade itu saja. Keberhasilan pembangunan mulai kembali tidak dapat dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu pada tahun 1997. Dimana pada tahun itu pula telah terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan bangsa Indonesia kembali terperangkap kedalam lingkungan kemiskinan dan ketertinggalan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia.

Krisis ekonomi telah meningkatkan kembali jumlah penduduk miskin di Indonesia secara drastis. Pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 % dari seluruh penduduk. Sedangkan pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 36,2 juta jiwa atau sekitar 16,7% dari seluruh penduduk (Kuncoro dalam mussawir2009;3).

Selanjutnya angka penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar 35,1 juta jiwa atau 15,97%. Kondisi ini memburuk di tahun 2006 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75%, yang disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dan kenaikan harga BBM. Namun berangsur-angsur kondisi itu terus membaik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan maret 2008 sebesar 34,96 juta jiwa atau 15,42%. Jumlah penduduk miskin sudah berkurang sebesar 2,21 juta jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2007, yang berjumlah 37,17 juta jiwa atau 16,58% (Sensenas dalam mussawir, 2009;3)

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan yang sedang dihadapi dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan

oleh Pemerintah, baik Nasional maupun oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan penyusunan berbagai macam rencana, program, bahkan kegiatan khusus dengan sasaran mengurangi atau menekan jumlah penduduk miskin. Upaya yang dilaksanakan tersebut belum sepenuhnya berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara keseluruhan, meskipun pada periode tertentu dapat menurunkan secara signifikan jumlah penduduk miskin.

Pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi selama ini diyakini sebagai strategi pembangunan yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat. Dalam tujuan pembangunan nasional tersirat bahwa, pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan penekanan kepada aspek peningkatan pendapatan masyarakat dan aspek pemerataan. Dengan terwujudnya kedua aspek tersebut, diharapkan kemiskinan penduduk dapat ditekan kalau tidak dapat dituntaskan.

Pengentasan masalah kemiskinan bukanlah pekerjaan yang ringan dan mudah untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena kemiskinan itu sendiri sangat kompleks sifatnya dan multidimensi. Sehubungan dengan hal ini maka untuk memecahkan persoalannya diperlukan kebijaksanaan, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat dan juga perlu adanya informasi tentang lokasi daerah miskin agar program dari penyaluran dana pembangunan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pekerjaan yang berat dan penuh tantangan. Pendekatan

pertumbuhan ekonomi semata, tentunya tidak dapat diandalkan untuk menurunkan kemiskinan karena tidak semua lapisan penduduk miskin dapat disentuh oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Oleh sebab itu dalam penyusunan dan pelaksanaan agenda mempercepat kemiskinan di Kecamatan, Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat perlu melibatkan semua pihak atau stakeholder.

Di Sumatera Barat sendiri masalah kemiskinan ini belum bisa teratasi sepenuhnya, berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2003-2009 seperti yang terdapat pada table di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2003-2009

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kep. Mentawai	12.9	11.8	12.7	11.6	10.0	14.7	13.23
Pesisir Selatan	55.6	52.0	51.1	63.3	54.6	47.3	44.26
Solok	71.7	65.9	50.3	62.3	58.5	45.0	40.81
Sijunjung	50.2	46.5	24.8	30.7	28.8	21.9	18.95
Tanah Datar	25.7	23.9	20.5	25.4	24.6	23.8	21.78
Padang Pariaman	53.1	47.0	53.7	66.5	62.5	51.5	45.15
Agam	57.9	57.2	56.0	59.4	51.1	45.3	39.68
Lima Puluh Kota	42.9	39.8	42.7	52.9	46.1	34.4	31.12
Pasaman	78.8	73.4	36.8	45.6	42.8	35.0	30.46
Solok Selatan	-	-	18.3	22.7	21.3	16.7	14.58
Dharmasraya	-	-	20.5	25.4	23.8	45.3	19.87
Pasaman Barat	-	-	36.7	45.5	42.7	21.2	30.38
Padang	31.1	31.8	34.0	42.1	39.5	51.7	46.81
Solok	3.3	3.3	2.2	2.70	2.50	4.00	3.76
Sawahlunto	2.9	2.9	2.7	1.50	1.10	1.00	1.23
Padang Panjang	1.6	1.6	2.0	2.50	2.60	4.20	14.01
Bukittinggi	3.3	3.3	5.0	5.30	5.20	7.20	6.24
Payakumbuh	7.5	6.3	6.6	8.20	7.70	10.90	10.13
Pariaman	6.3	5.7	6.2	5.50	3.90	3.50	3.62
Sumatera Barat	501.1	472.4	482.8	578.7	529.2	473.7	426.11

Sumber : BPS Sumatera Barat 2011

Berdasarkan table 1 dapat dilihat Sumatera Barat juga berusaha mengurangi tingkat kemiskinan yang masih membelenggu masyarakat

dengan terus berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pemerintah cukup berhasil dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebesar 482.80 ribu jiwa dan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 426.11 ribu jiwa. Meskipun masih dalam jumlah yang kecil tapi ini memberikan kontribusi yang cukup dalam pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan table 1 di atas Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang masih tergolong miskin di Sumatera Barat namun cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2009 menurut BPS jumlah penduduk miskin terbesar pertama yaitu Padang dengan jumlah 46.81 dan Padang Pariaman sebanyak 45.15 ribu jiwa dan Pasaman Barat sendiri menempati urutan ke tujuh dengan jumlah penduduk miskin mencapai 30.38 ribu jiwa.

Dalam konteks kemiskinan di daerah apa yang terjadi dalam tingkat nasional berkolerasi positif dan juga terjadi daerah. Kebijakan desentralisasi pembangunan yang bertujuan mempercepat proses pembangunan di daerah dimana salah satu targetnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah belum mampu berjalan dengan baik. Begitu juga dengan persoalan pemekaran wilayah yang sejak desentralisasi bergulir menjadi trend yang berkembang. Beberapa kasus krusial kemiskinan justru ditemukan pada daerah baru tersebut sesuai dengan pendapat Hidayat dalam (Saputra 2008;98). Bukannya persoalan kemiskinan dapat diatasi malahan ada tendensi peningkatan. Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan bagian dari daerah pemekaran juga mengalami persoalan-persoalan di atas terutama menyangkut

aspek kemiskinan. Dengan jumlah rumah tangga miskin mencapai 30.38 ribu jiwa merupakan sebuah angka yang cukup tinggi (Badan Pusat Statistik 2011). Ini perlu menjadi perhatian bagi daerah karena selain tingginya angka kemiskinan tersebut, akan muncul persoalan-persoalan lain yang menjadi multiplier efek dari kemiskinan seperti persoalan pendidikan, kesehatan, social dan adanya kecendrungan kelangkaan pangan pada masyarakat miskin dan lainnya. Tantangan kedepan dalam pembangunan daerah Pasaman Barat akan semakin besar. Selain adanya persaingan antar daerah dalam penguasaan ekonomi regional akan muncul persoalan-persoalan lingkungan yang akan terdegradasi bila kemiskinan terus di biarkan, ini sangat mengkhawatirkan bagi daerah Kabupaten Pasaman Barat. Potensi kekayaan alam yang melimpah dengan penduduk yang banyak berada pada garis kemiskinan akibat terjadi persoalan eksploitasi, eksploitasi akan menjadi efek yang sangat besar dalam pembangunan ke depan. Walaupun ada indikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tetapi untuk jangka panjang menjadi kontribusi negatif yang akan terus memacu pertumbuhan kantong-kantong kemiskinan. Inilah yang perlu menjadi perhatian serius oleh Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mengentaskan kemiskinan (saputra, 2008;99).

Peneliti tertarik meneliti Kabupaten Pasaman Barat karena jumlah penduduk miskin di daerah masih tergolong tinggi pada tahun 2009 yaitu 30.38 ribu jiwa. Selain itu Pasaman Barat yang merupakan daerah

pemukaran juga mengalami persoalan-persoalan yang menyangkut aspek kemiskinan sebagaimana yang terjadi pada daerah pemekaran lainnya.

Tabel 1.2
Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah RT	Persentase Jumlah RT (%)	Jumlah RTM	Persentase Jumlah RTM
1	Sungai Aur	7.462	8,95	2.494	10,31
2	Sungai Beremas	4.904	5,88	2.463	10,19
3	Lembah Melintang	9.291	11,14	3.531	14,60
4	Pasaman	12.621	15,13	2.261	9,35
5	Talamau	5.955	7,14	3.053	12,63
6	Kinali	8.858	10,62	2.813	11,63
7	Sasak Ranah Pasisia	3.043	3,65	1.272	5,26
8	Gunung Tuleh	5.059	6,06	1.277	5,28
9	Ranah Batahan	5.888	7,05	1.804	7,46
10	Luhak Nan Duo	14.074	16,88	1.156	4,78
11	Parit Koto Balingka	6.268	7,51	2.056	8,50
Jumlah		83.423		24.180	

Sumber : Kantor kecamatan Pasaman

Jumlah rumah tangga miskin dari total keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat yang terbanyak berada di kec. Lembah melintang dengan total rumah tangga miskin sebanyak 3.531 KK dan diikuti oleh Kec. Talamau sebanyak 3.053 KK. Kec. Luhak Nan Duo merupakan kecamatan yang memiliki paling sedikit rumah tangga miskin yaitu sebanyak 1.156 KK dan untuk Kec. Sasak Ranah Pasisia sebanyak 1.272 KK. Sedangkan untuk kecamatan Pasaman sendiri dari total penduduk 12.621 KK jumlah rumah tangga miskin adalah sebanyak 2.261 KK atau 9,35% dari jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Pasaman Barat.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Pasaman cukup tinggi, hal ini mungkin berbeda dengan

pandangan orang selama ini yang beranggapan bahwa Kecamatan Pasaman merupakan Kecamatan yang angka kemiskinanya tergolong cukup rendah, selain itu Kecamatan Pasaman merupakan kecamatan yang paling pesat perkembangannya di bandingkan dengan kecamatan lain yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat, dan kondisi infrastruktur di kecamatan pasaman juga lebih baik di bandingkan dengan kecamatan lainnya.

Masih tingginya kemiskinan di Kecamatan Pasaman kemungkinan disebabkan masih kurangnya kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan, seperti masih tingginya biaya pendidikan sehingga masih banyak yang tidak dapat bersekolah yang pada akhirnya menyebabkan kesempatan kerja yang dimiliki menjadi berkurang. Selain itu factor dari dalam diri masyarakat juga menjadi factor utama penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Pasaman dimana masih rendahnya etos kerja anggota masyarakat. Orang (yang tidak miskin) biasanya menilai orang miskin sebagai orang yang malas, tidak tekun, tidak mempunyai konsep mengenai hari esok, bersikap menerima nasib, dan berbagai pola kelakuan yang tidak sesuai atau jelek, seperti: tidak tertarik pada politik, tidak ada perhatian terhadap masalah perbaikan sosial, serta tidak punya rasa harga diri dan kehormatan.

Kemiskinan di Kec. Pasaman belum dapat teratasi sepenuhnya, berdasarkan pengamatan penulis kemungkinan kemiskinan di Kecamatan Pasaman di sebabkan oleh masih tingginya jumlah penduduk yang hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat SD/ sederajat sesuai dengan data

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kec.Pasaman pada Tahun 2009 di bawah ini.

Tabel1.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kec. Pasaman pada Tahun 2009

Tingkat Pendidikan	Penduduk (Jiwa)		
	L	P	L + P
SD / sederajat	9.253	9.338	18.591
SMP / sederajat	3.413	3.226	6.639
SMA / sederajat	4.347	3.656	8.003
Akademi	325	541	866
Perguruan Tinggi	480	375	855
JUMLAH	17.818	17.136	34.954

Sumber BPS Kab. Pasaman Barat 2009

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari 34.954 jiwa jumlah penduduk di Kec.Pasaman sebanyak 18.591 jiwa hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat SD / sederajat. sedangkan yang menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP dan SMA / sederajat adalah masing-masing sebanyak 6.639 jiwa dan 8.003 jiwa, dan untuk penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan hingga Akademi adalah sebanyak 866 jiwa sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan hingga ke tingkat Perguruan Tinggi adalah sebanyak 855 jiwa.

Masih tingginya jumlah penduduk yang hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat SD/sederajat hal ini kemungkinan tidak terlepas dari masih mahal nya biaya pendidikan, dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan, selain itu keinginan untuk bersekolah masih rendah hal ini terlihat dari banyak nya anak usia sekolah

yang memilih untuk bekerja daripada bersekolah dimana dengan mereka bekerja bisa menambah pendapatan keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan pada rumah tangga miskin di Kecamatan Pasaman masih rendah karena mereka lebih memilih bekerja daripada bersekolah hal ini disebabkan karena selain biaya pendidikan yang cukup mahal dengan mereka bekerja maka pendapatan keluarga juga akan ikut bertambah yang pada akhirnya taraf kesejahteraan keluarga juga ikut meningkat.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana jika tingkat pendidikan tinggi akan memberikan peluang kerja yang besar, dan akan mempengaruhi pendapatan seseorang. Jika pendapatan meningkat maka kebutuhan ekonomi akan terpenuhi, dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan sebaliknya.

Selain tingkat pendidikan yang masih rendah kepemilikan atas luas lahan pertanian juga menjadi factor penyebab kemiskinan di Kecamatan Pasaman karenadalam bidang pertanian, penguasaan tanah bagi masyarakat merupakan unsur yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraannya. Luas penguasaan lahan bagi rumah tangga petani akan berpengaruh pada produksi usahatani yang akhirnya akan menentukan tingkat pendapatan. Semakin luas lahan pertanian yang dimiliki maka pendapatan juga akan ikut bertambah dan begitu juga sebaliknya, semakin sedikit lahan

yang dimiliki untuk bertani maka penghasilan petani akan rendah dan tingkat kesejahteraan keluarga juga akan rendah.

Berdasarkan pengamatan penulis pada umumnya rumah tangga miskin di Kecamatan Pasaman hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha untuk bertani dan menjadi sandaran hidup bagi keluarga. Selain itu banyak juga rumah tangga miskin di Kecamatan Pasaman yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi menggantungkan hidupnya di sector pertanian baik sebagai buruh tani harian maupun yang mengelola lahan pertanian milik orang lain dengan cara bagi hasil.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian pada rumah tangga miskin di Kecamatan Pasaman adalah $\pm 0,5$ ha, bahkan ada juga rumah tangga miskin di Kecamatan Pasaman yang tidak memiliki lahan pertanian. Berdasarkan pengamatan penulis hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar tanah dikuasai oleh beberapa orang saja yang memiliki modal besar, selain itu ada juga yang memiliki tanah yang cukup tetapi mereka kurang memiliki pengetahuan dan modal untuk mengolah lahan yang bisa menambah pendapatan keluarga.

Disamping faktor yang telah dijelaskan diatas jumlah tanggungan juga dapat menentukan tingkat kesejahteraan suatu keluarga, semakin banyak jumlah tanggungan kepala keluarga maka tingkat kesejahteraan keluarga akan semakin rendah karena dibutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga.

Pada tabel 1.3 di bawah ini disajikan data tentang Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 di Kabupaten Pasaman Barat.

Table 1.4
Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Pada tahun 2010

Kecamatan	Jumlah RT (KK)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Rata-rata Anggota RT (Jiwa)
Sungai Beremas	4.904	22.348	4.56
Ranah Batahan	5.888	23.284	3.95
Koto Balingka	6.268	26.110	4.17
Sungai Aur	7.462	30.808	4.13
Lembah Melintang	9.291	41.950	4.52
Gunung Tuleh	5.059	20.260	4.00
Talamau	5.955	25.807	4.33
Pasaman	12.621	60.885	4.30
Luhak Nan Duo	8.858	37.342	4.22
Sasak Ranah Pasisie	3.043	13.223	4.35
Kinali	14.074	60.524	4.30
Pasaman Barat	83.423	362.587	4.27

Sumber BPS Kab. Pasaman Barat 2010

Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 di Kabupaten Pasaman Barat adalah 83.423 rumah tangga, rata-rata anggota rumah tangga setiap Kecamatan berkisar antara 3,95 orang sampai dengan 4,56 orang. Kecamatan Ranah Batahan merupakan Kecamatan dengan rata-rata anggota rumah tangga terkecil yaitu 3,95 orang anggota rumah tangga. Sedangkan Kecamatan Sungai Beremas merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah rata-rata anggota rumah tangga tertinggi yaitu 4,95 anggota orang rumah tangga.

Untuk Kecamatan Pasaman sendiri rata-rata anggota rumah tangga tergolong cukup tinggi yaitu 4,30 anggota rumah tangga, hal ini berarti bahwa

rata-rata banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga di Kec. Pasaman adalah sebanyak 4,30 anggota rumah tangga. Semakin tinggi jumlah anggota keluarga maka jumlah tanggungan kepala keluarga juga akan semakin tinggi, dan semakin tinggi jumlah tanggungan maka tingkat pengeluaran rumah tangga juga akan semakin tinggi maka tingkat kessejahteraan keluarga semakin rendah karena dibutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga.

Berdasarkan pengamatan penulis masih tingginya rata-rata anggota keluarga di Kec. Pasaman kemungkinan tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Keluarga Berencana (KB) dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga masih belum optimal, selain itu untuk ikut dalam program KB juga memerlukan biaya sehingga banyak dari masyarakat yang berpendapatan rendah menjadi enggan untuk ikut serta dalam program KB tersebut sehingga banyak di antara penduduk yang berpendapatan rendah tersebut memiliki lebih dari dua orang anak yang tentu saja akan menambah beban tanggungan keluarga.

Selain faktor yang telah di jelaskan di atas keluarga miskin umumnya cenderung memiliki banyak anak, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan keluarga miskin yang beranggapan dengan banyaknya jumlah anak maka dapat menjadi tenaga kerja atau sumber pendapatanebagian kalangan masyarakat di Kec. Pasaman juga masih memiliki keyakinan yang samabahwa banyak anak akan membawa keberkahan atau rezeki. Sehingga hal ini menyebabkan jumlah rata-rata anggota keluarga di Kec. Pasaman cukup tinggi

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan yang rendah mendorong keluarga miskin untuk menambah jumlah anak, karena anak dianggap sumber tenaga kerja murah dan sandaran hidup di hari tua. Padahal semakin besarnya jumlah anak, maka semakin besar jumlah tanggungan keluarga miskin, konsumsi meningkat, tingkat tabungan yang kian menyusut tanpa diimbangi meningkatnya pendapatan. Pada akhirnya tingkat kemiskinan akan bertambah parah.

Jadi besarnya jumlah anggota keluarga berpengaruh pada semua anggotanya apabila anggota keluarga bertambah jumlahnya, kebutuhan mendasar juga meningkat sehingga kebutuhan lainnya terabaikan seperti kebutuhan untuk kesehatan dan pendidikan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara teoritis jumlah anggota keluarga mempunyai hubungan dengan tingkat kemiskinan rumah tangga yang akan mempengaruhi kualitas hidup.

Selain faktor- faktor yang telah dijelaskan di atas budaya kerja seseorang juga mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Budaya kerja mencerminkan tingkat produktivitas seseorang. Jika budaya seseorang itu dalam bekerja semangat dan rajin maka akan memperoleh penghasilan yang tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, namun apabila budaya seseorang dalam bekerja kurang bersemangat dan malas maka dapat dipastikan pendapatan yang diperolehnya akan rendah sehingga kesejahteraan keluarganya akan rendah.

Di sisi lain budaya kerja juga diartikan sebagai etos kerja yang sangat erat kaitannya dengan lama jam kerja seseorang dalam melakukan pekerjaan (mencari nafkah), dari budaya kerja seseorang dapat terlihat apakah keluarga tersebut keluarga yang sejahtera atau keluarga miskin. Artinya, semakin lama seseorang melakukan aktivitas mencari nafkah maka peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar akan mereka dapatkan. Jadi, budaya kerja dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tinggi rendahnya etos kerja seseorang.

Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan pengamatan penulis terlihat bahwa terdapatnya budaya kemiskinan yang dialami rumah tangga miskin di Kecamatan Pasaman yang terlihat dari adanya budaya malas, pasrah dan menyerah pada nasib, hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakatnya yang gemar duduk di warung untuk menghabiskan waktu daripada mencari alternatif pekerjaan lain untuk menambah penghasilan keluarga sehingga kesejahteraan keluarga meningkat, selain itu budaya malas juga masih terdapat dalam masyarakat hal ini terlihat dari banyak orang yang bekerja hanya sampai tengah hari padahal mereka mampu untuk bekerja hingga sore hari yang tentu saja akan menambah penghasilan yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan keluarga akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa terdorong untuk meneliti dan menganalisis tentang fenomena penduduk miskin di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan

judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih jelasnya masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Pasaman dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala keluarga.
2. Bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Pasaman dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki.
3. Bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Pasaman dipengaruhi oleh jumlah tanggungan kepala keluarga.
4. Bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Pasaman dipengaruhi oleh budaya kerja masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini lebih jelas dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Penulis akan menganalisis penyebab kemiskinan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang disebabkan oleh: pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan, dan budaya kerja.

D. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana tingkat pendidikan mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
2. Sejauhmana luas lahan mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
3. Sejauhmana jumlah Tanggungan kepala keluarga mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
4. Sejauhmana Budaya Kerja mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
5. Sejauhmana tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan keluarga serta budaya kerja mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
- b. Pengaruh luas lahan yang dimiliki terhadap kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
- c. Pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?

- d. Pengaruh budaya kerja terhadap kemiskinan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
- e. Pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan jumlah tanggungan serta budaya kerja terhadap kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan
 - Sebagai salah satu bentuk penerapan dari ilmu ekonomi pembangunan tentang teori kemiskinan.
2. Bagi Pemerintah
 - a. Dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menekankan tingkat kemiskinan di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bagi penulis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Ekonomi program Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNP.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara lebih mendalam dari masalah yang belum terungkap.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep dan Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah konsep yang abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang atau ideologi yang dianut (Darwin. 2005). Pendekatan dalam memahami kemiskinan telah banyak mengalami kemajuan. Bila semula pengertian kemiskinan hanya ditekankan pada kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. maka kini kemiskinan telah mengalami perluasan arti dengan menyentuh posisi individu dalam proses-proses perubahan sosial ekonomi serta akses dalam politik (<http://bungansadat.blogspot.com/2010>)

Pengertian kemiskinan bukanlah suatu hal yang mudah. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi akan berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala sosial. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi disekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan. Sebaliknya kebudayaan kemiskinan lebih banyak terletak dalam diri penduduk miskin itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku dan sebagainya. (Esmara dalam Desnim 2009;14)

Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan

derajat dan martabat manusia, ketersingkirkan sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relative (*relative deprivation*). (<http://www.scribd.com/2011>)

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah (Supriatna, 2000:196)

Kemiskinan menurut para ekonom adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Adapun, masalah yang timbul belakangan adalah sulitnya menentukan tingkat hidup minimum, karena tingkat tersebut berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari satu daerah ke daerah lainnya, yang mencerminkan perbedaan kebutuhan-kebutuhan psikologis, sosial dan ekonomi dari setiap orang. Oleh karenanya, para ahli ekonomi cenderung membuat perkiraan-perkiraan yang serba konservatif atau sederhana tentang kemiskinan dalam rangka menghindari perkiraan-perkiraan yang berlebihan. Perkiraan itu sendiri didasarkan pada metodologi umum

yang sudah populer dengan sebutan garis kemiskinan internasional (international poverty line). (Todaro, 2006: 67).

Dari penjelasan konsep ekonomi di atas, jelas bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Dalam hal perkiraan pendapatan tersebut harus masuk kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak. Bila sekiranya tingkat pendapatan seseorang atau keluarga tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin.

Menurut Todaro (2006:242) seseorang dikatakan miskin secara absolute apabila tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, antara lain pangan, sandang, kesehatan perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Uraian di atas menjelaskan bahwa seseorang dikatakan miskin secara absolute apabila tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan. Pada umumnya konsep kemiskinan selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Apabila tingkat pendapatan tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok, maka orang tersebut dikatakan miskin.

Menurut Winardi dalam Rumiati (2000:100) mengatakan bahwa kemiskinan bahwa lazim di lukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.

Kemiskinan menurut BAPPENAS (2004). Mendefenisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang. Laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Hak hak dasar masyarakat desa antar lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan lingkungan hidup.

2. Jenis Kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (*poverty line*) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat

pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin(Roy Hendra, 2010;20).

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan (<http://andist.wordpress.com/2008>).

Kemiskinan Absolut diindikasikan dengan suatu tingkat kemiskinan yang di bawah itu kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Versi lain dalam mendefinisikan Kemiskinan Absolute adalah tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. (<http://julissarwritting.blogspot.com/2007>)

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang.Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. (BPS 2008)

Senada dengan pendapat diatas Sudantoko(2009:43-46) mendefenisikan kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum.

Dapat disimpulkan secara umum bahwa kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga dalam membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan taraf hidup kemanusiaan yang paling mendasar seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

2. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budayadan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan (Chriswardani Suryawati, 2005).

Kemiskinan struktural adalah akibat kebijakan pemerintah dan perilaku korporasi yang membuat masyarakat miskin tidak atau sedikit sekali memiliki akses terhadap aset ekonomi produktif.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih.

Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah karena pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, jika pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan. Sehingga tidak ada masyarakat miskin yang naik kelas, artinya jika pada awalnya buruh, nelayan, pemulung maka selamanya menjadi buruh nelayan dan pemulung, karena tidak ada upaya dalam menaikkan derajat dan kemampuan mereka baik itu dalam kesempatan pendidikan atau pelatihan.

Dari pendapat diatas Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

Selanjutnya Kemiskinan struktural, kata beberapa pakar adalah sebuah kemiskinan yang hadir dan muncul bukan karena takdir, bukan karena kemalasan, atau bukan karena karena nasab. Kemiskinan struktural ini, lanjut beberapa pakar adalah kemiskinan yang muncul dari suatu usaha pemiskinan. Ya pemiskinan, suatu usaha untuk menciptakan jurang semakin lebar saja antara yang kaya dengan yang miskin, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Lebih jauh kemiskinan struktural, lanjut para pakar strukturalis, adalah kemiskinan yang timbul dari adanya korelasi struktur yang timpang, yang timbul dari tiadanya suatu hubungan yang simetris dan

sebangun yang menempatkan manusia sebagai obyek. Kemiskinan struktural timbul karena adanya hegemoni dan justru karena adanya kebijakan negara dan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, sehingga justru orang yang termarjinalkan semakin termarjinalkan saja (<http://www.w3.org/1999>).

3. Kemiskinan Kultural

Cultural secara etimologi yaitu budaya atau kebudayaan, miskin yang dikarnakan adanya budaya malas, tidak tekun dan tidak stabil dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Tidak mempunyai konsep dalam hidup, boros, yang tidak punya motivasi dalam bekerja yang akan menjadikan masyarakat itu miskin.

Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mauberusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar (Chriswardani Suryawati, 2005).

Kemiskinan Kultural disebabkan pemahaman suatu sikap, kebiasaan hidup dan budaya seseorang atau masyarakat yang merasa kecukupan dan tidak kekurangan. Secara umum, kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha pihak luar untuk membantu. Dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin (Sumodiningrat, 1998: 30).

Dari pendapat diatas dapat di ketahui bahwa kemiskinan kultural timbul bukan karena struktur perekonomian yang timpang sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan tetapi karena adanya budaya dari masyarakat tersebut seperti budaya malas, pemboros, tidak kreatif, dan adanya suatu sikap atau kebiasaan dari seseorang maupun masyarakat yang merasa kecukupan dan tidak kekurangan, sehingga kelompok ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha pihak luar untuk membantu.

Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. (BPS 2008)

3. Ukuran Kemiskinan

Untuk membedakan antara penduduk miskin dengan penduduk yang tidak miskin biasanya digunakan garis pembatas yang disebut garis kemiskinan. Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan inilah yang disebut dengan penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan keadaan kekurangan dari berbagai dimensi. Keadaan kekurangan tersebut dapat dipandang dari dimensi ekonomi,

kesehatan, sosial, partisipasi, pemenuhan hak-hak dasar dan dimensi lainnya. Ukuran kemiskinan yang lebih banyak digunakan adalah ukuran pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Ukuran dimensi lainnya adalah indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan manusia, indeks kesetaraan gender dan lain-lainnya. Dengan ukuran indeks ini, potret kemiskinan secara makro dapat dikemukakan lebih lengkap.

Klasifikasi atau penggolongan orang atau masyarakat itu dikatakan miskin, ditetapkan dengan menggunakan tolok ukur. Tolok ukur yang umumnya dipakai adalah tingkat pendapatan dan kebutuhan relatif.

Selanjutnya menurut penelitian Harahap, Yuanita (2006:19), suatu masyarakat dapat dilihat tingkat kesejahteraannya dan penghidupan yang layak dari beberapa kondisi sosial ekonomi yaitu: perumahan, lama kawin, lama kepemilikan sumberdaya ekonomi dan jumlah tanggungan keluarga. Kelima indikator tersebut dapat memberikan suatu kondisi apakah suatu masyarakat digolongkan masyarakat miskin atau tidak miskin. Perumahan dan permukiman dalam kehidupan manusia memiliki fungsi dan peran penting serta arti dan makna yang dalam. Keadaan perumahan mencerminkan taraf hidup, kepribadian, dan peradaban penghuninya.

Kriteria masyarakat miskin lainnya adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut terdiri dari hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak lainnya.

Tabel 2.1
Kriteria Kemiskinan

Lembaga	Kriteria
Bank Dunia	Penghasilan < US \$ 1 = Rp. 9.000,- / hari
BPS sampai tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sangat miskin : < 1900 kal/org/hari + Rp 120.000/bln ❖ Miskin : 1900 - 2100 kal/org /hari + Rp.120.000/bln ❖ Hampir Miskin : 2100 – 2300 kal/org /hari + Rp.175.000/bln
BKKBN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pra-Sejahtera : <ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi : makan < 2 kali per hari; tidak ada pakaian ganti; sebagian besar berlantai tanah. - Non Ekonomi : tidak beribadah; berobat tidak ke sarana kesehatan. ▪ Pra-Sejahtera I: <ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi : tidak makan daging > 1 minggu; luas lantai < 8 m² per jiwa - Non Ekonomi : sakit 3 bulan terakhir dan tidak ke sarana kesehatan

Sumber : Petunjuk Teknis Bantuan Kredit Mikro Nagari, TKPK Sumatera Barat.(2007)

Selanjutnya menurut Arsyad (2000:13), kemiskinan dapat dilihat dari beberapa pendekatan atau sudut pandang antara lain dari sisi ekonomi atau dari aspek pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan), yang ukurannya sangat relatif dan sangat ditentukan oleh penetapan garis kemiskinan oleh masing-masing negara.

Selain itu BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. (BPS dalam BMT center 2011)

Setiap tahun BPS melakukan penyesuaian terhadap garis kemiskinannya. Sebab utamanya adalah perubahan harga (inflasi), namun kadang juga oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Selama ini GK selalu naik, dan hampir bisa dipastikan pula untuk tahun-tahun mendatang. Sumber data utama yang dipakai BPS untuk menentukan GK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). Sebagai contoh, GK pada bulan Maret 2007 adalah Rp.166.697,- per kapita per bulan. Sebetulnya yang secara praktis dipergunakan adalah garis kemiskinan menurut daerah, pedesaan atau perkotaan. Garis kemiskinan pada Maret 2007 untuk daerah pedesaan sebesar Rp.146.837,- sedangkan untuk daerah perkotaan sebesar Rp.187.942,-. Dan berdasarkan data dan informasi kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2010 garis kemiskinan di Kabupaten/kota di Pasaman Barat adalah \leq Rp 258.155,- di kategorikan miskin.

Keluarga miskin, biasanya disebut rumah tangga miskin (RTM), dihitung dengan cara serupa. Dengan anggota keluarga sebanyak empat

orang (rata-rata di Indonesia) maka garisnya adalah empat kali GK itu sesuai dengan domisilinya, desa (Rp587.348) atau kota (Rp751.768) (BPS 2007).

Selain garis kemiskinan nasional yang diterbitkan BPS, ada pula garis yang cukup dikenal, yang biasa disebut sebagai “garis kemiskinan Bank Dunia”.Ukurannya adalah pendapatan US\$2 per kapita setiap harinya.Hanya saja US\$2 yang dimaksud bukanlah benar-benar nominal pada nilai tukar sekarang (atau sekitar Rp18.000), melainkan dua dolar yang sudah disesuaikan dengan dengan kemampuan daya beli masyarakat masing-masing negara. Dengan garis kemiskinan US\$2-PPP (purchasing power parity) per hari ini, menurut laporan Bank Dunia (2007), tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 49.0% (hampir 110 juta jiwa). Sekitar 42 persen diantaranya berpendapatan di kisaran US\$1-US\$2.Sekitar 7% lagi berpenghasilan di bawah US\$1, atau sangat miskin.(World Bankdalam BPS 2007).

Garis kemiskinan merupakan patokan terpenting untuk mengukur tingkat kemiskinan. Oleh karena itu kebijaksanaan untuk mengatasi kemiskinan akan terkait dengan tolak ukur garis kemiskinan. Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam mengukur tingkat kemiskinan, menurut Widodo dalam (Syaid, 2007: 17) diperoleh dari persamaan :

$$K = \frac{q}{n} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Dimana : K = tingkat kemiskinan.

q = jumlah penduduk miskin atau berada dibawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk.

Pemerintah pada tahun 2005 melaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (penerima BLT). Hasil pendataan ini memberi informasi tentang siapa dan dimana masyarakat miskin berada, kategori masyarakat miskin dan ciri-ciri masyarakat miskin. Garis kemiskinan yang ditetapkan BPS untuk penduduk sangat miskin, miskin dan hampir miskin berturut-turut adalah Rp 120.000, Rp 150.000 dan Rp 175.000 per orang per bulan. Garis kemiskinan ini tidak dibedakan menurut daerah kota dan kabupaten sehingga diperkirakan jumlah keluarga miskin di daerah kota lebih rendah dan di daerah kabupaten lebih tinggi dari keadaan sebenarnya.

4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan

Berdasarkan hasil temuan data yang ada di lapangan maupun yang dipublikasikan oleh BPS dan BAPEDDA Kabupaten Pasaman Barat, telah diidentifikasi faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, secara umum faktor-faktor tersebut berkaitan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan lokal dan teknologi, keempat faktor ini secara dominan baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat. Orang (yang tidak miskin) biasanya menilai orang miskin sebagai orang yang malas, tidak tekun, tidak mempunyai konsep mengenai hari esok, bersikap menerima nasib, dan berbagai pola kelakuan yang tidak sesuai atau jelek, seperti : tidak tertarik pada politik, tidak ada perhatian terhadap masalah perbaikan sosial, serta tidak punya rasa harga diri dan kehormatan.

Sumber Daya Manusia berkaitan erat dengan pembangunan, oleh sebab itu diperlukan pengembangan SDM guna menunjang semua aspek pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu negara dapat dilihat atas indikator kesehatan, pendapatan, pendidikan, jenis pekerjaan. Keempat indikator tersebut akan menggambarkan tingkat kualitas hidup manusia dalam pembangunan di negaranya.

Menurut Tjiptoherijanto(1994:69) mengatakan kualitas manusia dan masyarakat merupakan masalah nasional yang semakin penting memasuki abad ke-21 dalam kegiatan dengan pembangunan kualitas yang holistik, kualitas sumber daya manusia adalah barang ekonomi yang langka dan oleh karenanya diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Kualitas manusia sering dibedakan dalam kualitas fisik dan non fisik.

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan latihan merupakan dua unsur yang saling terkait dan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan artinya diperlukan penanganan yang

sejenis dan berencana karena melaksanakan pendidikan dan latihan memerlukan biaya yang besar, tetapi hasil yang diperoleh juga cukup besar dan kesalahpahaman diperkecil.

Menurut Todaro (2006:434) pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, pendidikan juga memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian dari investasi pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan langkah yang paling strategis dalam upaya mengatasi kemiskinan yang berkaitan erat dengan pendapatan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan bukan untuk menambah pengetahuan saja tetapi juga meningkatkan keterampilan, sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Ilmu pengetahuan telah menjadi kebutuhan dasar manusia, melalui pendidikan seseorang juga akan memiliki wawasan berpikir yang luas dan kritis, dapat membimbing keluarga dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pula tingkat penghasilan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan pula perubahan

terhadap produktivitas kerja. Peningkatan pendidikan atau keterampilan akan meningkatkan kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja untuk memperoleh pendapatannya dan secara keseluruhan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu menurut Suryadi dalam Dorestu(2008: 22), bahwa titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas tenaga kerja dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan semakin tinggi produktivitas tenaga kerja dan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Pengertian ini diyakini oleh suatu teori yang menamakan dirinya teori human kapital. Teori tersebut menerangkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Teori ini merasa yakin bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu memiliki hasil yang lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditanggung karenanya. Teori human capital menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi, baik bagi individu maupun bagi masyarakat.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha pengembangan diri pribadi dan kemampuan, bisa melalui pendidikan formal atau dengan pelatihan-pelatihan dan juga didapat melalui lingkungan dimana kita berada.

Jadi latar belakang pendidikan dapat membedakan kualitas seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuannya akan bertambah pula, maka hal ini yang membuat seseorang bernilai lebih dibandingkan dengan orang lain yang mempunyai pendidikan lebih rendah. Untuk mengadakan perubahan yang terarah dan terencana untuk suatu perbaikan, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dan memadai sehingga dapat diandalkan. Berarti untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dan tingkat pendidikan masyarakat yang lebih rendah akan dapat menghambat terlaksananya pembangunan di segala bidang.

Secara teoritis menurut Simanjuntak dalam Desnim (2008:30):

“Tingkat pendidikan dan keterampilan kerja akan mempengaruhi tingkat pendayagunaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan, sebaliknya tenaga kerja dengan pendidikan tinggi akan mempunyai produktivitas yang tinggi dan karenanya akan mendapatkan balas jasa (upah) yang tinggi”.

Oleh karena itu pendidikan merupakan langkah yang paling strategis dalam upaya mengatasi kemiskinan yang berkaitan erat dengan pendapatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil peluang untuk menjadi miskin dan sebaliknya.

b. Luas Lahan

Pertanian sangat tergantung pada keadaan alam terutama faktor tanah atau areal pertanian tersebut. Dalam hal ini tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena tanpa adanya tanah usaha pertanian tidak akan jalan. Tiap jenis tanaman menghendaki suatu keadaan tertentu dari tanah supaya hasilnya memuaskan. Adiwilaga (dalam Munawarah, 2001:17) mengatakan, ditinjau dari sudut ekonomi pertanian, tanah dapat dianggap sebagai dasar utama kegiatan potensial yaitu daya menghasilkan benda yang tergantung dalam alam.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1993:489) yang dimaksud dengan lahan adalah tanah terbuka dan tanah garapan. Tanah garapan adalah tanah terbuka yang digunakan untuk lahan pertanian. Jadi lahan dapat diartikan sebagai suatu tempat atau tanah yang mempunyai luas tertentu yang digunakan untuk usaha pertanian.

Sukirno (2002:4) menyatakan tanah sebagai faktor produksi, menurutnya :

“Tanah adalah mencakup bagian permukaan bumi yang tidak tertutup oleh air atau bagian dari permukaan bumi yang dapat dijadikan untuk tempat bercocok tanam dan untuk tempat tinggal termasuk pula kekayaan alam yang terdapat didalamnya”.

Di negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi yang paling penting dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa yang diterima oleh tanah lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain (Mubyarto, 1986:77).

Dalam bidang pertanian, penguasaan tanah bagi masyarakat merupakan unsur yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraannya. Luas penguasaan lahan bagi rumah tangga petani akan berpengaruh pada produksi usahatani yang akhirnya akan menentukan tingkat ekspor (Mubyarto, 1986:79). Luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian. Sering kali dijumpai makin luas lahan yang dipakai dalam usaha pertanian semakin tidak efisien lahan tersebut. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa luas lahan mengakibatkan upaya melakukan tindakan yang mengarah pada segi efisiensi akan berkurang karena :

- a. Lemahnya pengawasan pada faktor produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja.
- b. Terbatasnya persediaan tenaga kerja di sekitar daerah itu, yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi usaha pertanian tersebut.
- c. Terbatasnya persediaan modal untuk membiayai usaha pertanian dalam skala luas tersebut.

Dan sebaliknya luas lahan yang sempit, upaya pengawasan faktor produksi akan semakin baik, namun luas lahan yang terlalu sempit cenderung menghasilkan usaha yang tidak efisien pula. Produktifitas tanaman pada lahan yang terlalu sempit akan berkurang bila dibandingkan dengan produktifitas tanaman pada lahan yang luas

(Soekartawi, 1989:15). Sedangkan menurut Sukirno (2002:4) tanah sebagai faktor produksi adalah tanah yang mencakup bagian permukaan bumi yang dapat dijadikan untuk bercocok tanam, dan untuk tempat tinggal dan termasuk pula kekayaan alam yang terdapat didalamnya. Dari pendapat ini dapatlah dikatakan bahwa tanah itu merupakan faktor produksi yang boleh dikatakan suatu pabrik dari hasil pertanian karena disanalah tempat produksinya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa luas lahan yang dimiliki oleh petani dapat pula mempengaruhi pendapatan suatu keluarga petani, yang mana petani yang mempunyai lahan yang luas akan mendapatkan penghasilan yang banyak pula dan kesejahteraan keluarga akan ikut meningkat, sedangkan petani yang memiliki lahan yang sedikit maka penghasilannya akan sedikit pula dan tingkat kesejahteraan keluarga menjadi rendah.

c. Jumlah Tanggungan

Keluarga atau rumah tangga merupakan suatu persekutuan terkecil sebagai bagian integral dari suatu masyarakat yang terikat oleh suatu ikatan yang kuat, terdiri dari kelompok individu hidup bersama sebagai unit sosial yang terikat oleh hubungan darah, perjanjian resmi atau hubungan sosial. Arief dalam Desnim (2008:32)

Kemudian Ginarti yang dikutip oleh Nawi dalam Desnim (2008:32) mengatakan rumah tangga atau keluarga adalah suatu kelompok primer unit terkecil dari masyarakat yang terikat oleh cinta kasih,

kewajiban, serta terikat oleh hubungan biologis, sosial dan ekonomis. Keluarga dalam arti ini terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya.

Sesuai dengan pengertian di atas menurut Aliasar dalam Desnim (2008:32) mengatakan bahwa keluarga dapat dibedakan atas dua bentuk yaitu:

- a) Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
- b) Keluarga terulur yang didalamnya tidak saja keluarga inti tetapi ditambah dengan famili lainnya seperti adik, mertua, nenek.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga atau keluarga adalah organisasi terkecil didalam masyarakat yang didalamnya terstruktur sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, dan anggota keluarga adalah semua orang yang menetap dalam suatu rumah tangga dan menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga.

Penduduk di berbagai negara berkembang yang berpendapatan rendah, seorang anak di inginkan karna di anggap sebagai sumber keuangan tambahan maupun sebagai jaminan sosial ekonomi dihari tua guna bertahan hidup. Anak, bagi masyarakat miskin, di pandang sebagai suatu investasi ekonomi yang nantinya diharapkan akan mendatangkan suatu hasil baik dalam bentuk tambahan tenaga kerja maupun sebagai sumber finansial orang tua di usia lanjut. Todaro (2006:338)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan yang rendah mendorong keluarga miskin untuk menambah jumlah anak, karena anak dianggap sumber tenaga kerja murah dan sandaran hidup di hari tua. Padahal semakin besarnya jumlah anak, maka semakin besar jumlah tanggungan rumah tangga miskin, konsumsi meningkat, tingkat tabungan yang kian menyusut tanpa diimbangi meningkatnya pendapatan. Pada akhirnya tingkat kemiskinan akan bertambah parah.

Nawi dalam Desnim (2008:33) juga berpendapat bahwa besarnya beban ketergantungan dalam arti jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga, akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan perkapita dan besarnya konsumsi rumah tangga tersebut.

Jadi besarnya jumlah anggota keluarga berpengaruh pada semua anggotanya apabila anggota keluarga bertambah jumlahnya, kebutuhan mendasar juga meningkat sehingga kebutuhan lainnya terabaikan seperti kebutuhan untuk kesehatan dan pendidikan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara teoritis jumlah anggota keluarga mempunyai hubungan dengan tingkat kemiskinan rumah tangga yang akan mempengaruhi kualitas hidup.

d. Budaya Kerja

Budhi Paramita dalam (Ndraha, 1999:80) mendefenisikan budaya kerja secara umum sebagai kelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat.

Menurut Budhi Paramita dalam (Ndraha 1999:81) selanjutnya, budaya kerja dapat dibagi menjadi:

a) Sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti bersantai, atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya.

b) Perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama karyawan, atau sebaliknya.

Variabel budaya kerja yang diartikan sebagai etos kerja yang sangat erat kaitannya dengan lama jam kerja seseorang dalam melakukan pekerjaan (mencari nafkah) menjadi suatu variabel yang diduga dapat membentuk suatu keluarga menjadi miskin. Artinya, semakin lama seseorang melakukan aktivitas mencari nafkah maka peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar akan mereka

dapatkan. Jadi, budaya kerja dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tinggi rendahnya etos kerja seseorang.

Menurut Ndraha (1999:83) sepanjang sejarah hakekat kerja dapat diidentifikasi berbagai pernyataan tentang kerja yaitu:

- a) Kerja adalah hukuman. Untuk bisa hidup manusia harus bekerja banting tulang cari makan. Salah satu bentuk hukuman adalah kerja paksa.
- b) Kerja adalah beban. Bagi orang malas, kerja adalah beban. Juga bagi kaum budak atau pekerja yang berada dalam posisi lemah.
- c) Kerja adalah kewajiban. Dalam sistem birokrasi atau sistem kontraktual, kerja adalah kewajiban, guna memenuhi perintah atau membayar utang.
- d) Kerja adalah sumber penghasilan. Kerja sebagai sumber nafkah merupakan anggapan dasar masyarakat umumnya.
- e) Kerja adalah kesenangan. Kerja sebagai kesenangan seakan hobi atau sport.
- f) Kerja adalah gengsi, prestise. Kerja sebagai gengsi berkaitan dengan status sosial dan jabatan.
- g) Kerja adalah aktualisasi diri. Kerja di sini dikaitkan dengan peran, cita-cita atau ambisi.
- h) Kerja adalah panggilan jiwa. Kerja di sini berkaitan dengan bakat

- i) Kerja adalah pengabdian kepada sesama. Kerja dengan tulus, tanpa pamrih.
- j) Kerja adalah hidup. Hidup diabdikan dan diisi untuk dan dengan kerja.
- k) Kerja adalah ibadah. Kerja merupakan pernyataan syukur atas kehidupan di dunia ini.
- l) Kerja adalah suci. Kerja harus dihormati dan kerja jangan dicemarkan dengan perbuatan dosa, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kerja dapat diidentifikasi sebagai suatu hukuman, beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, panggilan jiwa, pengabdian kepada sesama, hidup, ibadah, dan suci. Hal ini tergantung pada masing-masing individu dalam mengidentifikasi kerja sebagai sesuatu yang sesuai dengan pernyataan tersebut.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Hasil penelitian Saleh (1997:69) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan PDRB yang pesat tidak mengakibatkan semakin mencengnya atau timpangnya distribusi pendapatan. Hal tersebut dibuktikan dengan analisa korelasi antar laju pertumbuhan ekonomi dengan koefisien yang menunjukkan hubungan berkebalikan, artinya semakin besar kenaikan PDRB akan semakin merata distribusi pendapatan.

Hasil penelitian Ayu (2006:87) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan petani di kota Padang, menyimpulkan bahwa luas lahan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat kemiskinan penduduk di kota Padang artinya secara bersama-sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berpengaruh signifikan terhadap penentuan miskin atau tidaknya suatu masyarakat petani di kota Padang. Artinya semakin tinggi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka semakin kecil peluang masyarakat petani tersebut berada dalam kemiskinan dan sebaliknya semakin rendah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar masyarakat petani tersebut berada dalam kemiskinan.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang mana faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan dan budaya kerja.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variable-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan keterkaitan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan di atas.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga ada beberapa variabel yaitu: Tingkat pendidikan, ini merupakan upaya untuk mengantarkan manusia kearah kedewasaan, dimana masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur pola kehidupannya. Jika tingkat pendidikan tinggi, keterampilan dan skill akan tinggi, produktifitas akan meningkat, pendapatan akan meningkat, sehingga rumah tangga tersebut tidak miskin lagi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan rumah tangga, maka cenderung rumah tangga menjadi tidak miskin.

Luas lahan, bertani merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mendapatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika masyarakat memiliki luas lahan yang cukup dan memadai untuk bertani maka hal ini akan dapat meningkatkan produktifitas petani, dan pendapatan akan meningkat, dengan demikian rumah tangga akan cenderung jauh dari jurang kemiskinan.

Jumlah tanggungan juga mempengaruhi kesejahteraan suatu keluarga. Jika semakin besar jumlah anak maka akan semakin besar tanggungan keluarga, sehingga konsumsi akan meningkat, tingkat tabungan akan menurun

tanpa di imbangi meningkatnya pendapatan, sehingga tingkat kemiskinan akan bertambah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, semakin besar jumlah tanggungan rumah tangga maka cenderung rumah tangga akan menjadi miskin.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh budaya kerja seseorang. Budaya kerja juga sebagai faktor penentu dalam mendapatkan pendapatan untuk kesejahteraannya.

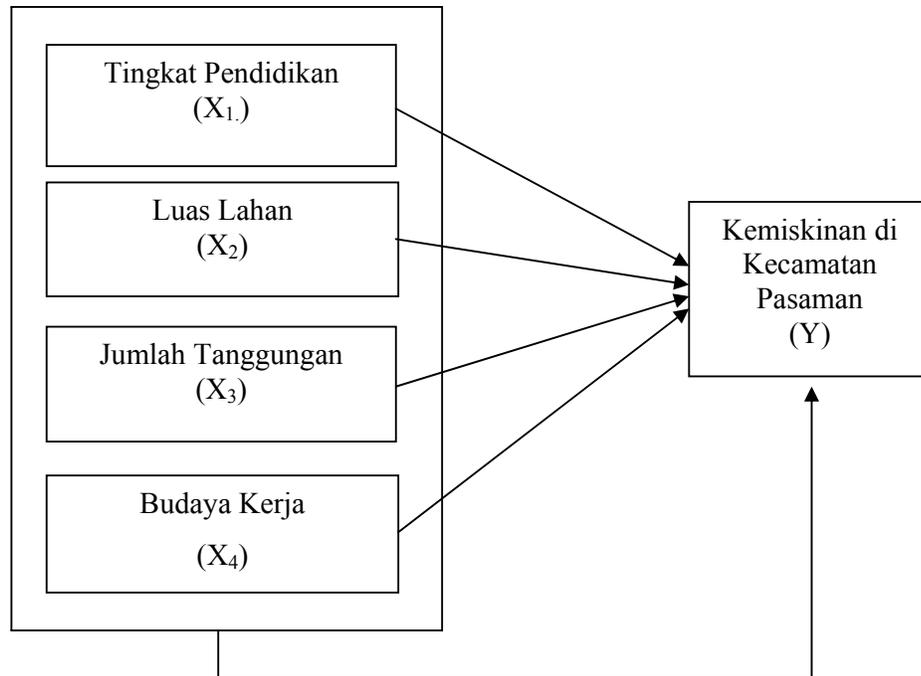
Dapat diketahui bahwa pengaruh variabel bebas (X), Tingkat Pendidikan (X_1), Luas Lahan (X_2), Jumlah Tanggungan (X_3) serta budaya kerja (X_4) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat tingkat kemiskinan rumah tangga (Y) dengan menggunakan unit secara keseluruhan variabel bebas (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (Y).

Keterkaitan antara masing-masing variabel terikat (Y) yaitu bahwa kemiskinan disebabkan oleh keterbelakangan, hal ini jelas terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan dan budaya kerja.

Dari kajian tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, luas lahan yang dimiliki, besarnya jumlah tanggungan serta budaya kerja yang rendah. Maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tersebut akan sangat menentukan miskin atau tidak miskinnya suatu rumah tangga.

Untuk lebih jelaskan dapat digambarkan seperti yang terlihat di bawah ini:

Gambar 2.1: Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Dengan adanya pengaruh pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan dan budaya kerja terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga keluarga miskin di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Maka penulis dapat menarik hipotesa sebagai berikut :

- a. Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

- b. Luas Lahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

- c. Jumlah tanggungan keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

- d. Budaya kerjam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

- e. Pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan keluarga, dan budaya kerjam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a = \text{salah satu koefisien regresi parsial } \beta_i \neq 0.$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ($\text{sig} = 0,000$) dengan tingkat pengaruh $-0,093$. Hal ini berarti semakin rendah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, semakin besar kemungkinan untuk berada dalam kemiskinan, namun sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga semakin kecil kemungkinan untuk berada dalam garis kemiskinan.
2. Luas lahan kepala rumah tangga mempunyai pengaruh signifikan yang terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ($\text{sig} = 0,007$) dengan tingkat pengaruh $-0,185$, artinya luas lahan menentukan miskin atau tidak miskinnya suatu rumah tangga. Tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh kepala rumah tangga ditentukan luas lahan kepala rumah tangga tersebut.
3. Jumlah tanggungan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman

Kabupaten Pasaman Barat ($\text{sig} = 0,044$) dengan tingkat pengaruh $-0,092$. Hal ini berarti semakin banyak jumlah tanggungan kepala rumah tangga, maka semakin besar pengeluaran suatu rumah tangga maka keluarga tersebut akan berada dalam kemiskinan, dan sebaliknya kepala rumah tangga yang memiliki jumlah tanggungan sedikit cenderung untuk tidak berada dalam kemiskinan.

4. Budaya kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ($\text{sig} = 0,028$) dengan tingkat pengaruh $-0,029$. Hal ini berarti apabila kepala keluarga memiliki sikap budaya kerja yang rendah, semakin besar kemungkinan untuk berada dalam garis kemiskinan, dan sebaliknya semakin tinggi sikap budaya kerja kepala rumah tangga maka semakin kecil kemungkinan untuk berada dalam garis kemiskinan.
5. Tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan dan budaya kerja mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat artinya secara bersama-sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penentuan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga. Artinya semakin tinggi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka semakin kecil peluang rumah tangga berada dalam garis kemiskinan dan sebaliknya semakin

rendah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar rumah tangga berada dalam garis kemiskinan.

B. Saran

Dalam upaya menekan tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Perlu memperhatikan saran-saran yang penulis peroleh berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, diantaranya :

1. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat masih relatif rendah, sedangkan pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka perlu meningkatkan pendidikan serta memberikan dan memfasilitasi program peningkatan pendidikan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menerima serta menelaah setiap informasi yang ada dan membawa dampak terhadap peningkatan pola hidup rumah tangga kearah yang lebih baik dengan menyadari akan pentingnya pendidikan.
2. Budaya kerja kepala rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat secara umum tergolong rendah tapi diharapkan kepala rumah tangga perlu meningkatkan lagi semangat dalam bekerja agar pendapatan bisa bertambah dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

3. Jumlah anggota keluarga rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat secara umum tergolong tinggi dengan rata-rata tanggungan kepala keluarga sebanyak 4 orang, untuk itu diharapkan rumah tangga di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dapat mengurangi jumlah anggota keluarga melalui program KB agar kebutuhan mendasar tidak meningkat dan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi dan pada akhirnya dapat menghindarkan diri dari kemiskinan.
4. Kepada pemerintah setempat dan instansi yang terkait disarankan untuk memberikan bantuan dan penyuluhan/pelatihan kepada rumah tangga miskin di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sehingga memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
5. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan Instansi terkait disarankan untuk memperbaharui kurikulum belajar atau menambah kurikulum dengan mata pelajaran kewirausahaan dan mengadakan praktek sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andist. (2008). *Pengertian Kemiskinan*. Artikel diakses dari internet dengan alamat website: <http://andist.wordpress.com/xmlrpc.php>. pada hari Selasa, 16 Agustus 2011 Pkl 21.00 WIB
- Arikunto, Suharsimi. (1991). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Arsyad, Lincolin. (2000). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Ayu, Mega. (2006). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Petani Di Kota Padang*. Skripsi UNP.
- BPS (2007). *Profil Kemiskinan di Indonesia*.
- (2008). *Analisis Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan*.
- (2009). *Sumatera Barat Dalam Angka*. Padang.
- (2009). *Pasaman Barat Dalam Angka*.
- (2010). *Pasaman Barat Dalam Angka*.
- (2011).
- Bungan Sadat. (2010). *Multidimensionalisme Kemiskinan*. Artikel diakses dari internet dengan alamat website: <http://mataharibungansadat.blogspot.com>. pada hari Selasa, 16 Agustus 2011 Pkl 21.00 WIB
- Criswardani Suryawati. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. <http://www.jmpkonline.net.pdf>. Diakses tanggal 11 November 2010.
- Desnim, Engla. (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang*. Skripsi Uneversitas Negeri Padang
- Djarwanto PS. (2001). *Statistik Non Parametrik*. Bagian I Edisi 3 : BPFE-UGM Yogyakarta.
- Dorestu, Almon. (2008). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Kota Sawahlunto (Studi Kasus Kecamatan Lembah Segar)*. Skripsi Uneversitas Negeri Padang